

**PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH
DIBANDINGKAN DENGAN PSAK NO. 102 TAHUN 2013
DI KJKS BMT YA UMMI FATIMAH**

Disusun oleh:

Muhammad Naufal Ramadhani

NIM.105020304111002

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih

Derajat Sarjana Ekonomi



**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2017**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAKSI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Lembaga Keuangan Syariah	10
2.1.1 Definisi, dan Prinsip Lembaga Keuangan Syariah	11
2.1.2 Fungsi Lembaga Keuangan Syariah	12
2.1.3 Baitul Mal Wat Tamwil	13
2.2 Kajian tentang Murabahah	14
2.2.1 Definisi Murabahah	14
2.2.2 Landasan Syariah Murabahah	15
2.2.3 Rukun dan Syarat Murabahah	16
2.2.4 Jenis-Jenis Murabahah	17

2.2.5 Karakteristik Murabahah	19
2.2.6 Akuntansi Murabahah (PSAK 102 Revisi 2013)	21
2.2.6.1 Pengakuan dan Pengukuran untuk Penjual	22
2.2.6.2 Penyajian	31
2.2.6.3 Pengungkapan	31
2.2.6.4 Acuan Alternatif	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Lokasi Penelitian	34
3.3 Sumber Data Penelitian	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data	34
3.5 Teknik Analisis Data	35
BAB IV PEMBAHASAN	39
4.1 Gambaran Umum KJKS BMT Ya Ummi Fatimah	39
4.1.1 Sejarah	39
4.1.2 Struktur Organisasi	41
4.2 Gambaran Akad Murabahah di KJKS BMT Ya Ummi Fatimah	43
4.2.1 Pelaksanaan Pembiayaan Akad Murabahah di KJKS BMT Ya Ummi Fatimah	43
4.2.2 Kebijakan Pembiayaan Akad Murabahah	45
4.2.2.1 Persyaratan pembiayaan	45

4.2.2.2 Keputusan Pembiayaan dan Jaminan	47
4.2.2.3 Prosedur Pembiayaan Murabahah	49
4.2.2.4 Penetapan Margin Pembiayaan Murabahah	50
4.3 Akuntansi Murabahah di KJKS BMT Ya Ummi Fatimah	51
4.3.1 Gambaran Umum Kebijakan Akuntansi	51
4.3.2 Perlakuan Akuntansi Murabahah yang Diterapkan oleh KJKS BMT Ya Ummi Fatimah	53
4.3.3 Penyajian Piutang Murabahah di Neraca	57
4.4 Pembahasan	60
4.4.1 Praktik dan Kriteria Murabahah	60
4.4.2 Akuntansi Murabahah	62
4.4.3 Penyajian dan pengungkapan	64
4.4.4 Ringkasan Hasil Penelitian	66
BAB V KESIMPULAN	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	76

BAB I

PENDAHULUAN

Bab 1 ini membahas mengenai latar belakang masalah yang akan dikaji, rumusan masalah, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat dari penelitian, dan sistematika penulisan hasil penelitian.

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan bank dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia mengalami peningkatan dari segi kuantitas maupun jenisnya. Perbankan syari'ah yang mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat dan disusul dengan Asuransi Syari'ah Takaful yang berdiri pada tahun 1994. Kedua lembaga tersebut bisa dikatakan sebaga pionir tumbuhnya bisnis syari'ah di Indonesia. Tidak hanya lembaga keuangan syari'ah yang bersifat komersial yang berkembang, namun juga lembaga keuangan syari'ah yang bersifat nirlaba. Bahkan lembaga keuangan mikro syariah seperti *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) juga turut berkembang pesat di Indonesia (Rifqi, 2010). Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tabel perkembangan LKS di Indonesia dari tahun ke tahun di bawah ini.

Tabel 1.1

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

No	Aspek	Tahun				
		2011	2012	2013	Des 2014	Jan 2015
1	Jumlah Bank	155	158	163	163	164
2	Jumlah Kantor	364	401	402	439	477
3	Total DPK (Milliar)	115.512	147.512	183.534	217.858	210.761

(Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Juni 2015)

Banyaknya LKS yang ada dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap sistem ekonomi syariah di masyarakat semakin berkembang dan dipahami manfaatnya. Pemahaman tersebut mencerminkan bahwa banyaknya jumlah LKS memiliki hubungan dengan jumlah dan minat serta pemahaman masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli yang paling dominan adalah *murabahah*. Hal ini dibuktikan dengan adanya tabel pada komposisi pembiayaan yang diberikan bank umum syariah dan unit usaha syariah pada Tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2

Komposisi pembiayaan yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit

Usaha Syariah (Milyar Rupiah)

No	Akad	Tahun				
		2011	2012	2013	Des 2014	Mei 2015
1	<i>Mudharabah</i>	10.229	12.023	13.625	14.354	14.906
2	<i>Musyarakah</i>	18.960	27.667	39.874	49.387	54.033
3	<i>Murabahah</i>	56.365	88.004	110.565	117.371	117.777
4	<i>Salam</i>	0	0	0	0	0
5	<i>Istihna</i>	326	376	582	633	678
6	<i>Ijarah</i>	3.839	7.345	10.481	11.620	11.561
7	<i>Qardh</i>	12.937	12.090	8.995	5.965	4.938

(Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Juni 2015)

Perkembangan lembaga keuangan syariah yang semakin maju, maka muncul kebutuhan akan akuntansi syariah untuk pencatatan dan pelaporan. Sehingga Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menerbitkan enam PSAK bagi seluruh lembaga keuangan syariah (LKS) yang disahkan tanggal 27 Juni 2007 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008. Keenam PSAK itu adalah PSAK No 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, PSAK No 102 tentang akuntansi *Murabahah* (jual beli), PSAK No 103 tentang Akuntansi Salam, PSAK No 104 tentang Akuntansi Isthisna, PSAK No 105 tentang Akuntansi *Mudarabah* (bagi hasil), dan PSAK No 106 tentang Akuntansi *Musyarakah* (kemitraan). Penyusunan keenam PSAK tersebut berdasarkan pada Pernyataan Akuntansi

Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Bank Indonesia dan sejumlah fatwa akad keuangan syariah yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Menurut Novita (2014) *Baitul Maal wat Tamwil* adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep *maal dan tamwil* dalam satu kegiatan lembaga. Konsep *maal* lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep *tamwil* lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro). Kehadiran BMT untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim di tengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip riba, sekaligus sebagai supporting funding untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

Akad *murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam *murabahah*, pihak penjual harus memberitahukan harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (PSAK 102, 2013). Akad *murabahah* adalah akad yang paling populer dan digemari oleh masyarakat Indonesia. Hal ini tampak pada Statistik Perbankan Syariah Indonesia Mei 2015 yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Nilai transaksi *murabahah* berada di peringkat pertama dengan jumlah 117.777 milyar rupiah, disusul oleh akad *musyarakah* dan *mudharabah* dengan jumlah 54.033

milyar rupiah dan 14.906 milyar rupiah (Bank Indonesia, 2015). Statistik ini menunjukkan masyarakat Indonesia sangat tertarik dengan produk *murabahah* yang ditawarkan oleh perbankan syariah.

Seiring bertumbuhnya produk keuangan akad *murabahah*, Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI mengharapkan entitas yang melakukan transaksi *murabahah* mampu mematuhi PSAK 102. DSAS IAI menerbitkan PSAK 102 pada tahun 2007. PSAK ini menggantikan sebagian peranan PSAK 59 yang mengatur akuntansi perbankan syariah. Namun, harapan DSAS IAI agar terlaksananya PSAK 102 secara ideal sepertinya belum dapat terwujud, karena kenyataan di lapangan masih banyak ditemukan entitas yang perlakuan akuntansi *murabahah*nya tidak sesuai dengan PSAK 102. Karena masih banyak entitas yang belum menerapkan PSAK 102 secara benar, maka DSN MUI menerbitkan fatwa nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 pada tanggal 21 Desember 2012 tentang metode pengakuan keuntungan *tamwil bi al-murabahah* (pembiayaan *murabahah*) di lembaga keuangan syariah. Fatwa ini menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah dapat menggunakan metode proporsional dan anuitas dalam pengakuan keuntungan (DSN MUI, 2012). Dengan diterbitkannya fatwa nomor 84/DSN-MUI/XII/2012, DSAS IAI kemudian menerbitkan Buletin Teknis 9 tentang penerapan metode anuitas dalam *murabahah*. Setelah diterbitkannya fatwa DSN MUI nomor 84/DSN-MUI/XII/2012, dan Buletin Teknis 9, DSAS menerbitkan PSAK 102 tahun 2013. Dalam PSAK 102 tahun 2013 LKS dapat mengakui keuntungan dengan metode proporsional atau anuitas. Pemilihan metode pengakuan keuntungan disesuaikan dengan tingkat risiko persediaan, apabila LKS

memiliki risiko persediaan signifikan maka menggunakan metode anuitas dan mengacu pada PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60.

Ada tiga penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa penjual di akad *murabahah* masih salah dalam menerapkan PSAK 102. Oktavia (2010) yang melakukan penelitian perbandingan PSAK 102 dengan perlakuan akuntansi *murabahah* di Koperasi Syariah Ben Iman, Lamongan menemukan praktik transaksi *murabahah* yang menyerupai praktik kredit konvensional. Praktiknya, koperasi meminjamkan kas kepada nasabah senilai harga pokok barang. Nasabah membeli barang dari *supplier*, kemudian berkewajiban mengembalikan uang pinjaman kepada koperasi beserta *margin* yang telah disepakati.

Novan (2014) melakukan penelitian perbandingan PSAK 102 dengan perlakuan akuntansi *murabahah* di PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BRI Syariah tidak mematuhi PSAK 102 tahun 2007 dan PSAK 102 Revisi Tahun 2013. Perilaku BRI Syariah Cabang Kota Malang yang memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk memperoleh persediaan *murabahah* dan mengukur keuntungan *murabahah* menggunakan metode anuitas adalah dua perlakuan akuntansi yang diatur PSAK 55. Hasil penelitian ini juga menunjukkan BRI Syariah kota Malang menggunakan kombinasi PSAK 102 Tahun 2007 dan PSAK 50, 55, dan 60 untuk perlakuan akuntansi piutang *murabahahnya*.

Renka (2015) yang meneliti tentang analisis penerapan PSAK 102 (Revisi 2013) terhadap pembiayaan *murabahah* pada produk kepemilikan kendaraan bermotor BRI Syariah IB Di PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang

Citarum Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi *murabahah* di BRI Syariah Cabang Citarum Bandung belum sesuai dengan PSAK 102 (Revisi 2013) dalam hal pengakuan diskon dan pendapatan angsuran margin *murabahah*.

BMT Ya Ummi Fatimah merupakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang berdiri tanggal 31 Oktober 1997, dengan No. Badan Hukum: 13416/BH/KWK.II/X/1997, SK PAD: 02/PAD/XIV/II/ 2012, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro 155 Pati, Kantor Pusat jalan KH. Ah. Dahlan 23 B Pati. Salah satu produk BMT Ya Ummi Fatimah adalah pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian, apakah akuntansi *murabahah* yang dipraktikkan oleh BMT Ya Ummi Fatimah Pati sudah sesuai dengan PSAK No. 102 tahun 2013 tentang akuntansi *murabahah*, dengan judul penelitian yaitu: **“Perlakuan Akuntansi *Murabahah* Dibandingkan dengan PSAK No. 102 Tahun 2013 di KJKS BMT Ya Ummi Fatimah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 tahun 2013?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi *murabahah* yang diterapkan pada BMT Ya Ummi Fatimah, apakah sudah sesuai dengan PSAK No 102 tahun 2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan perlakuan akuntansi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 tahun 2013.
2. Mengetahui perlakuan akuntansi *murabahah* yang diterapkan pada BMT Ya Umami Fatimah, apakah sudah sesuai dengan PSAK No 102 tahun 2013.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara lebih spesifik manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi BMT Ya Umami Fatimah

Sebagai masukan yang bermanfaat bagi BMT Ya Umami Fatimah tentang komitmen perlakuan akuntansi *murabahah* dengan mengacu pada PSAK 102 tahun 2013.

2. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan bagi penulis mengenai mekanisme dan proses akuntansi *murabahah* pada BMT Ya Umami Fatimah.

3. Bagi peneliti lain

Sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berminat untuk mengkaji tentang proses akuntansi *murabahah* yang dijalankan sesuai PSAK 102 tahun 2013.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam mengarahkan skripsi ini, penulis membuat sistematika penulisan yang terbagi ke dalam bab dan sub bab pembahasan sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.
- BAB II Tinjauan Pustaka, mengenai konsep Lembaga Keuangan Syariah (LKS) *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), akuntansi syariah, konsep *murabahah*, jenis *murabahah*, pembiayaan *murabahah*, rukun dan syarat *murabahah*.
- BAB III Metode Penelitian, membahas tentang jenis penelitian, tempat penelitian, sampel sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik keabsahan data. Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk mempermudah jalannya penelitian.
- BAB IV Pembahasan, membahas tentang perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada BMT Ya Ummi Fatimah, kesesuaian praktik pembiayaan *murabahah* BMT Ya Ummi Fatimah dengan PSAK 102 tahun 2013, dan hasil analisis praktik pembiayaan *murabahah* BMT Ya Ummi Fatimah dengan PSAK 102 tahun 2013.
- BAB V kesimpulan, berisi tentang kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 ini membahas mengenai konsep Lembaga Keuangan Syariah, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), konsep *murabahah*, syarat dan rukun *murabahah*, karakteristik *murabahah*, jenis *murabahah*, dan akuntansi *murabahah*.

2.1 Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah (DSN-MUI, 2003). Definisi ini menegaskan bahwa suatu LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariat islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Jadi, lembaga keuangan syariah harus patuh pada aturan tentang lembaga keuangan yang berlaku, tetapi tidak boleh bertentangan dengan syariat islam.

Unsur kesesuaian suatu LKS dengan syariat Islam secara tersentralisasi diatur oleh DSN, yang diwujudkan dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Adapun unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan diatur oleh berbagai instansi yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin operasi. Beberapa institusi tersebut antara lain adalah sebagai berikut : 1) Bank Indonesia sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat; 2) Departemen Keuangan sebagai institusi yang salah

satu tugasnya adalah mengatur dan mengawasi koperasi; dan 3) Kantor Menteri Koperasi sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi koperasi.

2.1.1 Definisi, dan Prinsip Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip Islam. Lembaga keuangan syariah dalam operasionalnya haruslah terbebas dari *riba* (tambahan), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (perjudian atau spekulasi) (Aji, Ibrahim, 2014).

Secara umum, prinsip dasar keuangan syariah seperti dijelaskan Imam Sugema (dikutip oleh Aji, 2014) adalah sebagai berikut :

1) Prinsip keadilan, yaitu a) keseimbangan antara hak dan kewajiban; b) tata hubungan sederajat (tidak ada pihak yang dirugikan); dan c) menempatkan sesuatu pada tempatnya. **2) Prinsip maslahah**, yaitu a) orientasi pada kebutuhan masyarakat banyak; b) orientasi pemenuhan kebutuhan dasar bukan keinginan; c) investasi pada sektor halal; dan d) tidak merusak lingkungan. **3) Prinsip zakat**, yaitu a) *social safety net*; b) zakat bukan *charity* tetapi kewajiban; c) mendorong aset untuk diinvestasikan; dan d) upaya pengendalian harta masyarakat untuk investasi bukan distribusi. **4) Prinsip bebas dari riba**, yaitu a) menghindari adanya pihak yang tereksplorasi; b) *maysir* (bebas dari spekulasi); c) meminimalisasi tindakan spekulasi; d) mendorong investasi di sektor riil; e) mendorong masyarakat berperilaku untuk orientasi jangka panjang. **5) Prinsip gharar**, yaitu a) *symmetric information*; b) meminimalkan transaksi yang tidak transparan; dan c) mempromosikan transparansi pada setiap transaksi. **6) Prinsip**

bathil (bebas dari hal yang tidak sah), yaitu a) uang bukan untuk diperdagangkan; b) uang bernilai apabila diinvestasikan; c) pertumbuhan uang sejalan dengan sektor riil; dan d) tidak mengenal konsep “*time value of money*” tetapi “*economic value of money*”.

2.1.2. Fungsi Lembaga Keuangan Syariah

Menurut Wiroso (2009) Lembaga Keuangan Syariah memiliki fungsi sebagai manajer investasi, investor, jasa layanan dan sosial.

1. Fungsi Manager Investasi

Salah satu fungsi Lembaga Keuangan Syariah yang sangat penting adalah manajer investasi. Lembaga Keuangan Syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dari dana yang dihimpun dengan prinsip *mudharabah* (dalam perbankan lazim disebut dengan deposan atau penabung), karena besar-kecilnya imbalan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana (khususnya dana *mudharabah*). Hal ini sangat dipengaruhi oleh keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari Lembaga Keuangan Syariah sebagai manajer investasi (pihak yang mengelola dana).

2. Fungsi Investor

Penyaluran dana, baik dalam prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), prinsip *ujroh* (*ijarah*) dan prinsip jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna'*), Lembaga Keuangan Syariah berfungsi sebagai investor (sebagai pemilik dana). Oleh karena sebagai pemilik dana maka dalam menanamkan dana dilakukan dengan prinsip yang telah ditetapkan dan tidak melanggar syariah,

ditanamkan pada sektor-sektor produktif dan mempunyai risiko yang sangat minim.

3. Fungsi Jasa Perbankan

Lembaga Keuangan Syariah memberikan jasa transfer, inkaso, *kliring* dengan prinsip *wakalah*; menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah yad amanah*, memberikan layanan *letter of credit* (L/C) dengan prinsip *wakalah*, memberikan layanan bank garansi dengan prinsip *kafalah*; melakukan kegiatan wali amanat dengan prinsip *wakalah*, memberikan layanan penukaran uang asing dengan prinsip *sharf* dan sebagainya.

4. Fungsi sosial

Konsep perbankan syariah mengharuskan bank-lembaga keuangan syariah memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana *qardh* (pinjaman kebajikan) atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam

2.1.3. Baitul Mal Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkan kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi: Baitut Tamwil (Bait = Rumah, at-Tamwil = Pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong

kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Menurut Widodo (2002) pengertian Baitul Tamwil adalah Lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat profit motif, dimana dana tersebut dari simpanan pihak ketiga dan disalurkan melalui bentuk pembiayaan atau investasi, yang dijalankan berdasarkan syariah.

Baitul Maal Wat-Tamwil merupakan sebuah lembaga keuangan yang berbentuk koperasi. Berkaitan dengan koperasi syariah, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91/Kep/M.KUK/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dalam Kep Men 91/2004 yang dimaksud dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Pasal 1.1) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

2.2. Kajian tentang *Murabahah*

Sub bab ini membahas mengenai definisi *murabahah*, landasan syariah *murabahah*, rukun dan syarat *murabahah*, jenis-jenis *murabahah*, karakteristik *murabahah*, dan akuntansi *murabahah*.

2.2.1 Definisi *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sedangkan

dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (Fatwa, 2006) yang dimaksud dengan Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. (Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf, 2010)

Menurut Muhammad (2013) *Murabahah* merupakan transaksi jual-beli barang antara bank syariah selaku penjual dengan nasabah selaku pembeli, dimana harga beli serta keuntungannya (*margin*) diberitahukan secara jelas.

Definisi *Murabahah* dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 Tahun 2013 paragraf 5, menyatakan Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

2.2.2. Landasan Syariah Murabahah

Landasan syariah murabahah berdasarkan Al-Qur'an yaitu pada Surat Al-Baqarah ayat 275, artinya :

“... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...”

Kemudian sesuai pada hadits Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wasallam, yang artinya :

“Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang didalamnya mengandung keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqaradhadh* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah)

2.2.3. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Menurut Widodo (2010), rukun dan syarat *murabahah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Penjual (*Ba'i*)

Penjual dalam hal ini adalah Lembaga Keuangan Islam (LKI), yaitu dapat berupa Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), atau *Baitul wa Tamwil* (BMT) yang disebut dengan istilah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Penjual (*Ba'i*) dan Pembeli (*Musytari*)

2) Pembeli (*Musytari*)

Pembeli dalam hal ini adalah nasabah, baik sebagai pembeli akhir ataupun selaku pedagang. Para pihak yang berakad dipersyaratkan harus cakap menurut hukum. Dalam pengertian hukum syara' harus sudah baligh dan dalam kaitannya dengan hukum perdata sebagai hukum positif, yang bersangkutan minimal harus berusia 21 tahun.

3) Barang yang Menjadi Objek Jual-Beli (*Mabi'*)

Barang yang menjadi objek jual-beli dipersyaratkan harus jelas dari segi sifat, jumlah, jenis yang akan diperjualbelikan termasuk *halalan thoyiban*, dan tidak tergolong pada barang yang haram atau yang mendatangkan *mudharat*. Selain itu, sifat barang harus bernilai. Objek *murabahah* dipersyaratkan telah menjadi milik dan dalam penguasaan penjual.

4) Harga Barang (*Tsaman*)

Harga barang dan keuntungan harus disebutkan secara jelas jumlahnya dan satuan mata uangnya. Demikian juga cara pembayarannya, yaitu secara tunai atau secara kredit (tangguh). Jika dibayar secara kredit, waktu pembayaran dan jangka waktunya harus jelas. Dalam konteks pembiayaan, harga jual barang adalah batas maksimal pembiayaan yang disebut plafon atau limit.

5) Kontrak atau Akad (*Sighat* atau *Ijab-Qabul*)

Dalam praktiknya, kontrak dapat dibuat secara tertulis di bawah tangan, namun juga dapat dibuat oleh notaris. Dibandingkan dengan perjanjian di bawah tangan, perjanjian secara notarial adalah lebih kuat dipandang dari segi hukum, namun yang seringkali dipakai adalah perjanjian yang dibuat sendiri oleh lembaga keuangan yang kemudian diberikan materai sebagai bentuk kekuatan hukum.

2.2.4. Jenis-Jenis *Murabahah*

Menurut Wiroso (2009), dilihat dari proses pengadaan barang *murabahah* dapat dibagi menjadi :

1. *Murabahah* tanpa pesanan

Dalam jenis ini pengadaan barang yang merupakan obyek jual beli dilakukan tanpa memperhatikan ada yang pesan atau tidak, ada yang akan membeli atau tidak, jika barang dagangan sudah menipis, penjual akan mencari tambahan barang dagangan. Pengadaan barang dilakukan atas dasar persediaan minimum yang harus dipelihara. Dalam *murabahah* tanpa pesanan ada dua tahapan yang terpisah yaitu tahapan pengadaan barang dan tahapan alur pembelian barang.

a. Alur pengadaan barang (bank syariah sebagai pembeli)

Dalam alur ini tidak memperhatikan ada yang membeli atau tidak, yang diperhatikan adalah pemenuhan ketentuan penyediaan persediaan minimum, dengan memperhatikan jangka waktu pengiriman, kelangkaan barang dan sebagainya. Umumnya proses ini dilakukan oleh pedagang grosir dan retail yang menjual kebutuhan masyarakat seperti supermarket, took dan sebagainya.

b. Alur proses jual beli (bank syariah sebagai penjual) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- Pembeli melakukan negosiasi dan menyepakati persyaratan yang terkait dengan jual beli tersebut.
- Pembeli melakukan negosiasi jual beli dengan LKS tentang barang, syarat pembayaran dan sebagainya, sampai diperoleh kesepakatan kedua belah pihak dan dilakukan akad jual beli murabahah.
- Berdasarkan akad murabahah tersebut LKS mengirimkan barang yang telah disepakati kedua belah pihak.
- Tahap terakhir dilakukan pembayaran harga barang sesuai kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak, baik dengan tunai, tangguh maupun dengan cicilan.

2. Murabahah berdasarkan pesanan (pemesanan pembelian)

Pemikiran mengenai penjualan murabahah berdasarkan pemesan pembelian tampaknya muncul karena dua alasan :

Pertama, untuk mencari pengalaman. Dalam akad dicantumkan bahwa, salah satu pihak yaitu pemesan pembelian meminta pihak lain untuk bertindak

sebagai pembeli (untuk membeli sebuah aset), dan pemesan berjanji akan membeli aset tadi dan bersedia memberikan keuntungan kepadanya, tergantung pada pengalaman (kepiawaian) pembeli. Orang-orang memerlukannya, karena sebagian mereka tidak mengetahui, dan bahkan bias secara sukarela.

Kedua, untuk mendapatkan pembiayaan (kredit). Pemesan pembelian meminta pembeli untuk membelikan aset dan berjanji untuk membeli kembali disertai dengan keuntungan penjualan. Dengan pengertian pembeli akan menjual aset kepada pemesan pembelian dengan syarat-syarat pembiayaan secara penuh maupun parsial. Pembiayaan ini umumnya merupakan suatu pendorong bagi pihak yang berhubungan dengan bank-bank syariah untuk bertransaksi atas dasar penjualan murabahah berdasarkan pemesan pembelian.

2.2.5. Karakteristik Murabahah

Karakteristik murabahah menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 Tahun 2013 tentang akuntansi murabahah paragraf 6 sampai dengan paragraph 17 adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
- b. Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.

- c. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli.
- d. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain, meliputi :
- diskon dalam bentuk apa pun dari pemasok atas pembelian barang;
 - diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang;
 - komisi dalam bentuk apa pun yang diterima terkait dengan pembelian barang.
- e. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.
- f. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atau asset lainnya.
- g. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, jika akad murabahah disepakati. Jika akad murabahah batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.
- h. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat

dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta'zir yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.

- i. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah jika pembeli melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu dan atau melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang disekati.
- j. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi jika pembeli melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan/atau mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

2.2.6 Akuntansi *Murabahah* (PSAK 102 Revisi 2013)

Ruang lingkup PSAK ini adalah untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi *murabahah* baik sebagai penjual maupun pembeli serta pihak lain yang melakukan transaksi *murabahah* dengan entitas-entitas tersebut. Akuntansi *murabahah* diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 Tahun 2013. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 Tahun 2013 merupakan revisi dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 Tahun 2007. Beberapa perubahan dalam PSAK 102 Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perbedaan antara PSAK 102 (2013) dan PSAK 102 (2007)

Perihal	PSAK 102 Tahun 2013	PSAK 102 Tahun 2007
Jenis <i>Murabahah</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Murabahah</i> yang merupakan jual beli (diatur di PSAK 102). - <i>Murabahah</i> yang merupakan pembiayaan berbasis jual beli (menggunakan PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60) 	<i>Murabahah</i> yang merupakan jual beli.
Pengakuan pendapatan <i>murabahah</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Berbasis <i>risk and reward</i> (diatur di PSAK 102) - Imbal hasil efektif (menggunakan PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60). 	Berbasis <i>risk</i> dan <i>reward</i> .

(Sumber : IAI, 2013)

2.2.6.1. Pengakuan dan Pengukuran untuk Penjual

Pengakuan dan pengukuran untuk penjual menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 Tahun 2013 paragraf 18-30 dilakukan pada saat perolehan aset *murabahah*, terjadi diskon *murabahah*, mengakui keuntungan *murabahah*, mengakui potongan pelunasan *murabahah*, mengakui potongan angsuran *murabahah*, mengakui denda, serta mengakui dan mengukur uang muka.

2.2.6.1.1. Pada Saat Perolehan Aset *Murabahah*

1. Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Jurnalnya :

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Dr. Aset Murabahah	xxx	
	Cr. Kas		xxx

2. Pengukuran persediaan *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut :

(a) jika murabahah pesanan mengikat, maka :

(i) dinilai sebesar biaya perolehan; dan

(ii) jika terjadi penurunan nilai asset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Jurnalnya:

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Dr. Beban Penurunan Nilai	xxx	
	Cr. Aset Murabahah		xxx

(b) jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka:

(i) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai neto yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan (ii) jika nilai neto yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Jurnal:

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Dr. Kerugian Penurunan Nilai	xxx	
	Cr. Aset Murabahah		xxx

3. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan asset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Jurnalnya :

	Dr. Kas / Piutang Murabahah	xxx	
	Cr. Aset Murabahah		xxx
	Cr. Pendapatan Margin Murabahah		xxx

2.2.6.1.2. Diskon *Murabahah*

1. Diskon atau potongan pembelian dari pemasok diakui sebagai:

a. Pengurang biaya perolehan aset *murabahah*, jika terjadi sebelum akad *murabahah*, jurnalnya:

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Dr. Aset Murabahah	xxx	
	Cr. Utang		Xxx

b. Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli, jurnalnya:

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Dr. Kas	xxx	
	Cr. Utang		Xxx

- c. Tambahan keuntungan *murabahah*, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual, jurnalnya :

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Dr. Kas	xxx	
	Cr. Pendapatan Murabahah		Xxx

- d. Pendapatan operasi lain, jika setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad, jurnalnya:

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Dr. Kas	xxx	
	Cr. Pendapatan Operasional Lain		Xxx

2. Liabilitas penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon tersebut akan tereliminasi pada saat :

- a. dilakukan pembayaran kepada pembeli, jurnalnya :

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Dr. Utang	xxx	
	Cr. Kas		xxx

- b. akan dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual, jurnalnya :

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Dr. Utang	xxx	
	Cr. Kas		xxx

Dan

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Dr. Dana Kebajikan Kas	xxx	
	Cr. Dana Kebajikan-Potongan Pembelian		xxx

2.2.6.1.3. Keuntungan Murabahah

1. Keuntungan murabahah diakui:

(a) Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun, jurnalnya :

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Dr. Kas	xxx	
	Dr. Piutang Murabahah	xxx	
	Cr. Aset Murabahah		xxx
	Cr. Pendapatan Margin Murabahah		xxx

(b) Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun.

Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahahnya :

(i) keuntungan diakui saat penyerahan asset murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relative kecil.

(ii) Diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga. Jurnalnya :

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Dr. Piutang Murabahah	xxx	
	Cr. Aset Murabahah		xxx
	Cr. Margin Murabahah Tangguhan		xxx

Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai akun kontra dari piutang murabahah. Pada saat penerimaan angsuran jurnalnya :

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Dr. Kas	xxx	
	Cr. Piutang Murabahah		xxx
	Dr Margin Murabahah Tangguhan	xxx	
	Cr. Pendapatan Margin Murabahah		xxx

(iii) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

2. Pengakuan keuntungan, dalam nomor 1 (b) (ii), dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan presentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Presentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan asset murabahah.

2.2.6.1.4. Potongan Pelunasan Piutang Murabahah

1. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.

2. Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut :

(a) diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah, jurnalnya :

	Dr. Kas	xxx	
	Dr. Pendapatan Margin Murabahah		xxx
	Cr. Piutang Murabahah		xxx

(b) diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli, jurnalnya :

	Dr. Kas	xxx	
	Dr. Pendapatan Margin Murabahah		Xxx
	Cr. Piutang Murabahah		Xxx

	Dr. Beban Potongan Pelunasan Murabahah	xxx	
	Cr. Kas		xxx

2.2.6.1.5. Potongan Angsuran *Murabahah*

Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut :

(a) jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Jurnalnya :

	Dr. Kas	xxx	
	Cr. Piutang Murabahah		xxx
	Dr. Potongan Angsuran Murabahah	xxx	
	Cr. Kas /Rekening Pembeli		xxx

(b) jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban. Jurnalnya :

	Dr. Kas	xxx	
	Cr. Piutang Murabahah		xxx

	Dr. Beban Potongan Angsuran Murabahah	xxx	
	Cr. Kas / Rekening Pembeli		xxx

2.2.6.1.6. Denda

Denda dikenakan apabila pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan (*qardhul hasan*), jurnalnya:

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Dr. Dana Kebajikan-Kas	Xxx	
	Cr. Dana Kebajikan-Denda		xxx

2.2.6.1.7. Uang muka

Uang muka (*urbun*), pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:

(a) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima, jurnalnya:

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Dr. Kas	xxx	
	Cr. Uang Muka Murabahah		xxx

(b) jika barang dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok)

(c) jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

2.2.6.2. Penyajian

1. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.
2. Marjin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah.
3. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang murabahah.

2.2.6.3. Pengungkapan

Penjual harus mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:

1. Harga perolehan aset *murabahah*;
2. Janji pemesanan *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan.; dan
3. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah

2.2.6.4 Acuan Alternatif

Dalam PSAK 102 tahun 2013 paragraf 41 A dijelaskan bahwa penjual yang tidak memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan untuk transaksi murabahah merupakan penjual yang melaksanakan transaksi

pembiayaan murabahah. Perlakuan atas transaksi tersebut mengacu pada PSAK 50: Instrumen Keuangan Penyajian, PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, dan PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan yang terkait aset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, yang dalam penerapannya disesuaikan dengan prinsip, karakteristik, dan istilah transaksi syariah. Dijelaskan lebih lanjut dalam dasar kesimpulan paragraf DK 19, DSAS IAI mengonfirmasi bahwa entitas yang menggunakan SAK ETAP sebagai dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangannya tidak mengacu pada PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60 untuk transaksi murabahah yang merupakan pembiayaan berbasis jual beli. Entitas tersebut mengacu pada SAK ETAP dimana acuan yang digunakan antara lain adalah SAK ETAP Bab 20 dan Bab 22.

Risiko yang terkait dengan kepemilikan persediaan antara lain:

- a. Risiko perubahan harga persediaan;
- b. Keusangan dan kerusakan persediaan;
- c. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan;
- d. Risiko pembatalan pesanan pembelian secara sepihak



BAB III

METODE PENELITIAN

Bab 3 ini membahas tentang metode penelitian. Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk mempermudah jalannya penelitian. Dalam bab ini akan dibahas jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2010) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian ini digolongkan ke dalam jenis penelitian studi kasus. Secara teknis studi kasus adalah suatu penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat (Arikunto, 2010). Secara umum studi kasus memberikan akses atau peluang yang luas kepada peneliti untuk menelaah secara mendalam, detail, intensif, dan menyeluruh terhadap unit sosial yang menjadi obyek penelitian (Bungin, 2008: 20).

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di BMT Ya Ummi Fatimah yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro 155 Pati Jawa Tengah. BMT Ya Ummi Fatimah Pati tanggal berdiri: 31 Oktober 1997. No. Badan Hukum:13416/BH/KWK.II/X/1997. SK PAD:02/PAD/XIV/II/2012.

3.3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer bersumber dari wawancara dengan informan penelitian, catatan akuntansi tentang murabahah yang diterapkan oleh BMT Ya Ummi Fatimah, Laporan Keuangan BMT Ya Ummi Fatimah, serta dokumen lainnya yang terkait proses pembiayaan murabahah pada BMT Ya Ummi Fatimah.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam pembahasan ini, penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2010) mendefinisikan *interview* sebagai berikut. “*a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*”. Wawancara adalah merupakan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Peneliti dalam penelitian ini akan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Menurut Sugiyono (2010) jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Wawancara dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung dengan informan penelitian yang menguasai tentang permasalahan dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Sri Wahyuni, Amd yang menjabat sebagai manajer administrasi KJKS BMT Ya Ummi Fatimah.

b. Studi dokumentasi

Dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan pada dokumen-dokumen tentang perlakuan akuntansi *murabahah* yang terdapat pada BMT Ya Ummi Fatimah Cabang Pati dan laporan-laporan yang terkait dengan masalah (objek) penelitian. Data dokumentasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Tahun 2015 BMT Ya Ummi Fatimah, dan dokumen-dokumen terkait dengan pembiayaan *murabahah*.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data untuk penelitian ini digunakan analisis deskriptif. Artinya peneliti akan menjelaskan atau mendiskripsikan data yang telah terkumpul. Adapun aktivitas dan tahapan dalam analisis data yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan informasi berkaitan dengan pembiayaan murabahah
2. Mencermati pembiayaan murabahah yang ada di KJKS BMT Ya Ummi Fatimah

3. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah yang ada di KJKS BMT Ya Ummi Fatimah
4. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah yang ada di PSAK 102
5. Bagaimana penerapan akuntansi murabahah di KJKS BMT Ya Ummi Fatimah dibandingkan dengan PSAK 102

1. Mengumpulkan informasi berkaitan dengan pembiayaan murabahah

Disini peneliti mencari data sebanyak dan selengkap mungkin melalui berbagai sumber yang ada seperti: buku, internet ataupun sumber lain untuk mengetahui tentang jasa pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* (jual-beli) terutama yang dijalankan oleh koperasi syariah guna mengetahui apa saja yang bisa dilakukan untuk menggali informasi lebih lanjut tentang isi penelitian yang dilakukan. Tahapan ini lebih mengarah ke pemahaman materi serta pencarian data-data pendukung dalam penelitian.

2. Mencermati pembiayaan murabahah yang ada di KJKS BMT Ya Ummi Fatimah

Peneliti mencari informasi tentang sistem pembiayaan akad *murabahah* yang digunakan oleh koperasi syariah yang diteliti yaitu BMT Ya Ummi Fatimah untuk mengetahui apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin menggunakan jasa ini, serta bagaimana prosedur pelaksanaan guna terpenuhinya akad pembiayaan *murabahah* yang dilakukan, Tahapan kedua ini mengarah pada syarat-syarat pengajuan pembiayaan menggunakan akad *murabahah*.

3. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah yang ada di KJKS BMT Ya Ummi Fatimah

Tahapan ini sebagai proses bagaimana peneliti mencari data tentang perlakuan akuntansi yang digunakan oleh objek penelitian yaitu BMT Ya Ummi Fatimah khususnya tentang akad pembiayaan *murabahah*, peneliti menggali informasi melalui jurnal-jurnal, laporan keuangan serta data-data pemasukan dan pengeluaran BMT Ya Ummi Fatimah untuk mempelajari perlakuan akuntansi.

4. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah yang ada di PSAK 102

Peneliti mempelajari tentang standar perlakuan akuntansi murabahah yang ada di PSAK 102 tahun 2013. Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui tentang dari pengakuan, penyajian dan pengungkapan dari transaksi pembiayaan murabahah sesuai dengan standar PSAK 102.

5. Bagaimana penerapan akuntansi murabahah di KJKS BMT Ya Ummi Fatimah dibandingkan dengan PSAK 102

Setelah mengetahui perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh BMT Ya Ummi Fatimah, peneliti kemudian mencocokkan serta membandingkannya dengan aturan dari Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) tentang perlakuan akuntansi sistem pembiayaan *murabahah* yang telah di atur dalam Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102. Tahapan ini bertujuan guna mengetahui apa saja perbedaan yang mungkin ada dalam perlakuan akuntansi BMT Ya Ummi Fatimah dengan PSAK No. 102 melalui akun-akun yang terdapat dalam laporan keuangan koperasi serta biaya-biaya yang timbul dan juga

persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan sistem akad pembiayaan *murabahah*.

Setelah kelima aktivitas dan tahapan dalam analisis data selesai dilakukan, maka peneliti akan menyimpulkan hasil analisis data sesuai dengan temuan penelitian yang ada di BMT Ya Ummi Fatimah, terutama pada bahasan perlakuan akuntansi pada PSAK No. 102 tahun 2013.



BAB IV

PEMBAHASAN

Bab 4 ini membahas tentang 3 hal. Pertama, peneliti akan membahas tentang gambaran umum KJKS BMT Ya Ummi Fatimah. Kedua, peneliti akan membahas tentang kebijakan pembiayaan murabahah di KJKS BMT Ya Ummi Fatimah. Ketiga, peneliti akan membahas tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan transaksi murabahah di KJKS BMT Ya Ummi Fatimah. Keempat, peneliti akan membahas akuntansi murabahah yang diterapkan di KJKS BMT Ya Ummi Fatimah dibandingkan dengan standar yang berlaku.

4.1. Gambaran Umum KJKS BMT Ya Ummi Fatimah

Dalam bab ini peneliti akan membahas tentang dua hal. Pertama, peneliti akan menjelaskan tentang sejarah dan profil KJKS BMT Ya Ummi Fatimah. Kedua, peneliti akan menjelaskan tentang struktur organisasi dan susunan manajemen.

4.1.1. Sejarah

Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Ya Ummi Fatimah Kabupaten Pati didirikan pada tanggal 15 Maret 1997 yang sebelumnya bernama Koperasi Pondok Pesantren Ya Ummi Fatimah. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Ya Ummi Fatimah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan berasaskan kekeluargaan. Dibentuknya KJKS BMT Ya Ummi Fatimah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tugas dan usaha yang dilakukan KJKS BMT Ya Ummi Fatimah dalam mencapai tujuannya, yaitu menyelenggarakan kegiatan usaha, meliputi simpanan, dan pembiayaan.

Badan Hukum KJKS BMT Ya Ummi Fatimah disahkan pada tanggal 31 Oktober 1997 dengan bentuk badan hukum sebagai berikut :

Nama : Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT
Ya Ummi Fatimah, disingkat KJKS BMT Ya Ummi
Fatimah
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro 155 Pati
Kantor Pusat : Jalan KH. Ahmad Dahlan 23B Pati
Tanggal berdiri : 31 Oktober 1997
No. Badan Hukum : 13416/BH/KWK.II/X/1997
Tanggal 31 Oktober 1997
SK PAD : 02/PAD/XIV/II/2012
Tanggal 14 Februari 2012

Kantor cabang KJKS BMT Ya Ummi Fatimah tersebar di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Pati. Selain di Kabupaten Pati, kantor cabang juga terdapat di beberapa kota di Jawa Tengah, yaitu di Rembang, Klaten, Tegal, Cilacap, dan Kudus. KJKS BMT Ya Ummi Fatimah juga memberikan asistensi dan pengendalian manajemen pada BMT Bina Martabat Insani di Yogyakarta.

4.1.2. Struktur Organisasi

Susunan pengurus dan manajemen di KJKS BMT Ya Ummi Fatimah adalah :

1. Susunan Pengurus

- a. Ketua : HM. Jatmiko CH
- b. Sekretaris : H. Kartono
- c. Bendahara : H. Slamet Budi Santoso

2. Dewan Pengawas Syariah

- a. Ketua : KH. Abdul Wahid Hasyim
- b. Anggota : H. Abdul Kholiq
- c. Anggota : M. Suparman, S.pdi

3. Manager

- a. Manager Umum : Dwi Setyaningrum, Amd
- b. Manager Internal : M. Ahyar, SE
- c. Manager Eksternal : A. Majuri, SE
- d. Manager Adminitrasi : Sri Wahyuni, Amd

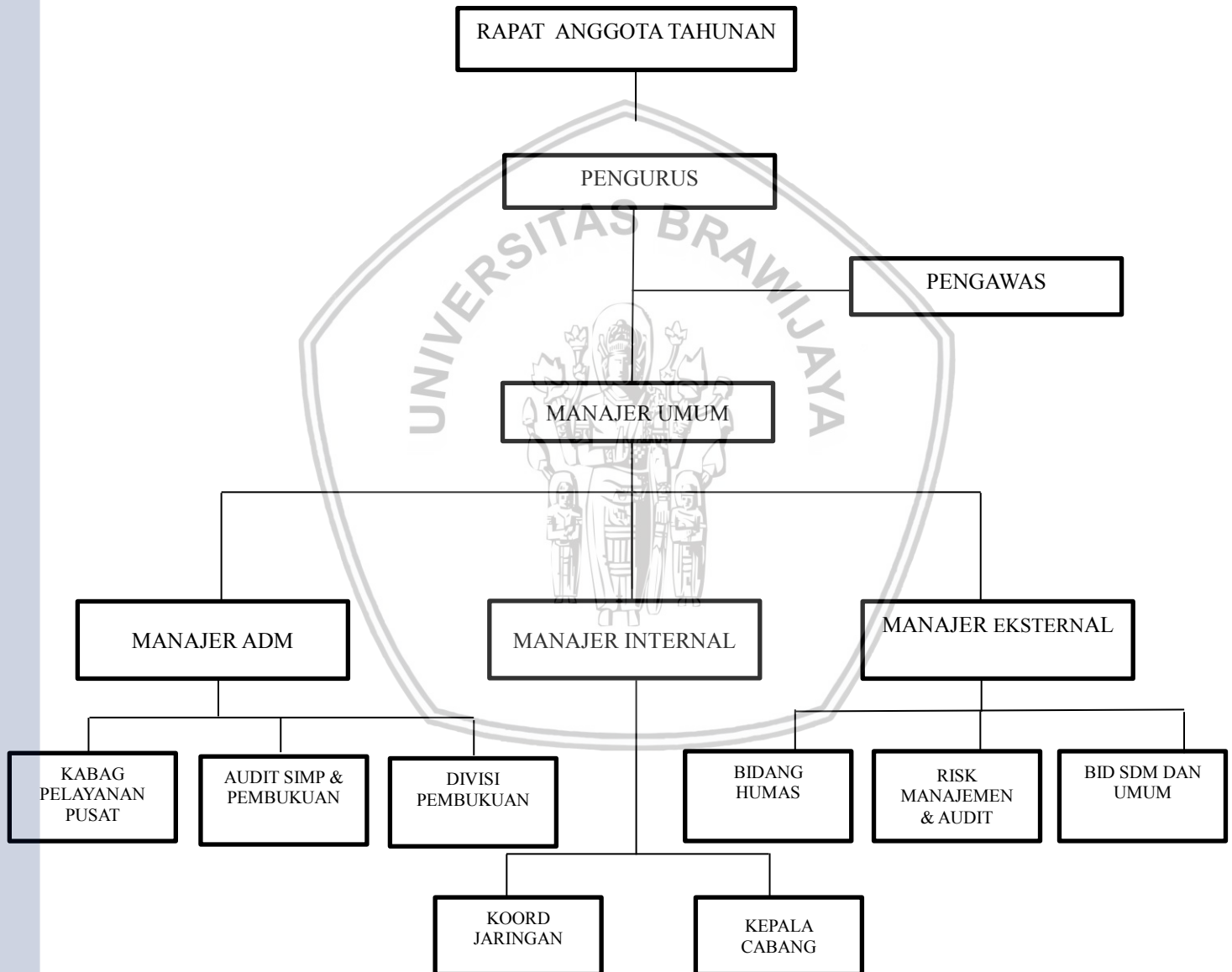
4. Koordinator Area:

- 1 Abu Masdar
- 2. Purnoto, A. Ma
- 5. Kabag
 - a. Kabag Riskfinance : Anto Prasetyo
 - b. Kabag Audit : Supriyadi

Struktur organisasi KJKS BMT Ya Ummi Fatimah dapat dilihat pada gambar 4.1.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi KJKS BMT Ya Ummi Fatimah



(Sumber: KJKS BMT Ya Ummi Fatimah, 2016)

4.2. Gambaran Akad Murabahah di KJKS BMT Ya Ummi Fatimah

Pada bab ini peneliti akan menguraikan akad murabahah menjadi 4 sub bab..

Pertama, peneliti akan menjelaskan tentang pelaksanaan pembiayaan akad murabahah di KJKS BMT Ya Ummi Fatimah. **Kedua**, peneliti akan menjelaskan tentang kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh KJKS BMT Ya Ummi Fatimah berkaitan dengan akad murabahah. **Ketiga**, peneliti akan menjelaskan laporan keuangan KJKS BMT Ya Ummi Fatimah. **keempat**, peneliti akan menjelaskan tentang perlakuan akuntansi pada KJKS BMT Ya Ummi Fatimah.

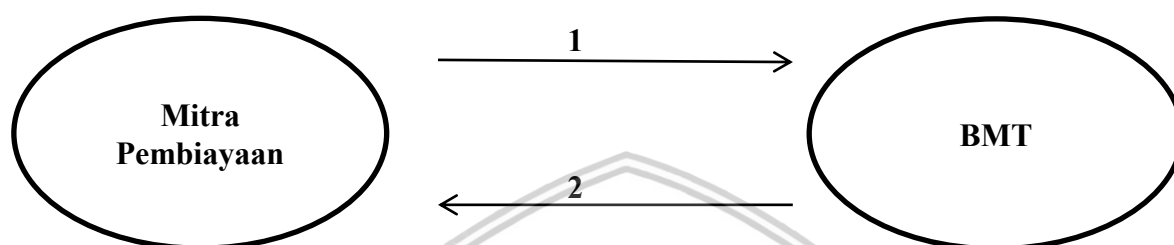
4.2.1. Pelaksanaan Pembiayaan Akad Murabahah di KJKS BMT Ya Ummi Fatimah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102:05)

Pelaksanaan pembiayaan murabahah di KJKS BMT Ya Ummi Fatimah bisa digambarkan dengan alur pada gambar 4.2 dibawah ini.

Gambar 4.2

Alur Pembiayaan Murabahah KJKS BMT Ya Ummi Fatimah



Keterangan :

1. Mitra pembiayaan datang ke KJKS BMT Ya Ummi Fatimah untuk memohon pembiayaan dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan. Kemudian mitra pembiayaan menjual asetnya kepada pihak BMT sesuai dengan harga pasar. Aset yang dimaksud adalah aset yang telah dimiliki oleh mitra pembiayaan, yang sebenarnya itu merupakan aset yang digunakan sebagai jaminan, bukan aset yang ingin dibeli oleh mitra pembiayaan. Ketika membeli aset mitra pembiayaan pihak BMT diwakili oleh divisi pembelian. Contoh surat perjanjian jual beli KJKS BMT Ya Ummi Fatimah dapat dilihat di lampiran 1.
2. Setelah aset milik mitra pembiayaan dibeli oleh pihak BMT, aset tersebut dijual kembali kepada mitra pembiayaan sebesar harga beli ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Pembayaran pembelian barang dilakukan oleh mitra pembiayaan dengan cara diangsur selama jangka waktu yang

disepakati. Ketika proses penjualan kembali kepada mitra pembiayaan, pihak BMT diwakili oleh kepala cabang, atau manajer administrasi. Contoh form akad murabahah KJKS BMT Ya Ummi Fatimah dapat dilihat di lampiran 2.

Dari skema yang telah digambarkan di atas, terdapat dua akad yang dilakukan oleh kedua pihak. Akad yang pertama BMT membeli aset dari mitra pembiayaan. Akad kedua pihak BMT menjual kembali aset tersebut kepada mitra pembiayaan dengan harga jual sebesar harga beli ditambah dengan keuntungan tertentu. Jadi dapat disimpulkan dalam pembiayaan akad murabahah yang dilaksanakan di KJKS BMT Ya Ummi Fatimah mitra pembiayaan sebenarnya tidak memohon pembiayaan untuk membeli sebuah barang, melainkan untuk mendapatkan pinjaman uang.

Terdapat beberapa kebijakan yang diterapkan oleh manajemen KJKS BMT Ya Ummi Fatimah berkaitan dengan Pembiayaan Akad Murabahah Kebijakan-kebijakan Pembiayaan Murabahah diterangkan lebih lanjut di sub-sub bab berikutnya.

4.2.2. Kebijakan Pembiayaan Akad Murabahah

Di bawah ini akan diuraikan kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan akad murabahah.

4.2.2.1. Persyaratan pembiayaan

a. Syarat umum :

- Mempunyai kegiatan dan atau pekerjaan yang pasti dan dapat menunjang terhadap setiap jenis pembiayaan yang diminta sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan.

- Bersedia memberikan jaminan sebagai agunan yang berupa sertifikat tanah atau Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)
- Penilaian jaminan berdasarkan harga pasar dan penilaian jaminan maksimal 75 % dari nilai agunan.
- Bersedia menandatangani akad pembiayaan beserta orang-orang yang terkait dan tidak terpaksa melakukannya (ridlo)
- Sempurna akal fikirannya, cukup umur (baligh), cakap (mengerti hukum).
- Setiap pembiayaan harus didasarkan analisa kelayakan yang didukung data administratif.

b. Syarat khusus

- Barang harus ada, jelas kepemilikannya, jelas kriterianya, (ukuran, bentuk, warna, dan sifat), dan halal.
- Harga harus pasti, jelas jenis mata uangnya, jelas jangka waktu, dan cara pembayarannya yang dihitung efektif sejak penyerahan barang.
- Jangka waktu tidak boleh didasarkan pada musim yang tidak tetap.
- Penetapan harga oleh unit simpan pinjam syariah sebagai penjual.

c. Syarat Administratif

- Foto copy KTP suami istri yang masih berlaku
- Foto copy kartu keluarga
- Foto copy bukti kepemilikan barang yang menjadi jaminan

4.2.2.2. Keputusan Pembiayaan dan Jaminan

Kebijakan manajemen terkait dengan keputusan pembiayaan dan pinjaman adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian pembiayaan harus didasarkan pada hasil analisa yang diberikan oleh petugas yang ditunjuk dengan setidaknya memenuhi kriteria : karakter, kemampuan, modal, prospek usaha, dan agunan.
- b. Setiap pembiayaan yang dikeluarkan agar lebih ditekankan pada faktor obyektifitas.
- c. BMT tidak boleh memberikan pembiayaan yang bersifat spekulasi dan *ghoror* meskipun memberikan dan menjanjikan keuntungan yang lebih tinggi.
- d. Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah diputuskan melalui komite pembiayaan.
- e. *Plafond* pembiayaan sampai dengan Rp. 15.000.000,- (Lima Belas juta Rupiah) wewenang komitenya adalah supervisor dan marketing.
- f. *Plafond* pembiayaan diatas Rp. 15.000.000,- (Lima Belas juta Rupiah) sampai dengan Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh juta Rupiah) wewenang komitenya adalah kepala cabang, supervisor, dan marketing.
- g. *Plafond* pembiayaan di atas Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) wewenang komitenya adalah manajer, kepala cabang, *supervisor*, dan *marketing*.

- h. *Plafond* pembiayaan di atas Rp. 100.000.000.- (Seratus juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000.- (Dua Ratus Juta Rupiah) wewenang komitenya adalah Pengurus, Manajer Umum, Manajer Internal, Kepala Cabang, *Supervisor*, dan *Marketing*.
- i. Setiap pemberian pembiayaan harus ada jaminan / agunan dari mustalif yang diserahkan kepada BMT.
- j. Agunan / jaminan yang dapat dilayani oleh BMT Ya Ummi Fatimah adalah berupa sertifikat tanah (SHM, SHGB), BPKB, dan atau Simpanan Sukarela Berjangka (Si Suka)
- k. Agunan berupa sertifikat dan atau BPKB dilakukan pengikatan akad yang memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, dibuat rangkap 2 dengan kekuatan hukum yang sama.
- l. Dalam hal agunan berupa simpanan, maka sertifikat dan atau kartu simpanan disimpan di BMT Ya Ummi Fatimah dan secara administratif dilakukan pemblokiran transaksi.
- m. Penilaian jaminan berdasarkan harga pasar dan besaran jumlah pembiayaan maksimal 75 % dari nilai jaminan sertifikat tanah , 65 % dari nilai jual agunan berupa BPKB, dan 90 % dari simpanan.

4.2.2.3. Prosedur Pembiayaan *Murabahah*

Prosedur pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut :

- a. Calon mitra pembiayaan datang ke kantor BMT Ya Ummi Fatimah dengan membawa kelengkapan administrasi sebagaimana yang telah ditetapkan.
- b. Calon mitra pembiayaan mengisi formulir permohonan pembiayaan yang disediakan oleh BMT Ya Ummi Fatimah.
- c. Formulir yang sudah diisi dan telah memenuhi persyaratan administrasi kemudian diteruskan kepada kepala cabang atau manajer untuk diadakan penelitian (*survey*) lebih lanjut berdasarkan kewenangan pembiayaan.
- d. Hasil survey dibawa ke panitia pembiayaan (komite) untuk memutuskan pembiayaan tersebut diterima atau ditolak.
- e. Selanjutnya keputusan komite diserahkan ke bagian administrasi, apabila permohonan ditolak maka segera dibuatkan surat penolakan, dan apabila disetujui segera diadakan pemrosesan untuk pencairan dan pengikatan
- f. Prosedur pemberian atau penolakan pembiayaan yang diajukan, diputuskan selambat-lambatnya dalam 7 hari sejak penyerahan permohonan.

4.2.2.4. Penetapan *Margin/Bagi Hasil Pembiayaan Murabahah*

Kebijakan manajemen mengenai penetapan margin/bagi hasil pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut :

- a. Dalam penetapan *margin/bagi hasil* pembiayaan BMT Ya Ummi Fatimah mengacu pada tingkat perkembangan pasar dengan tidak mengesampingkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan etika bisnis Islam
- b. Penetapan *margin/bagi hasil* pembiayaan sampai dengan *plafond* Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setara dengan 2,5 %.
- c. Penetapan *margin/bagi hasil* pembiayaan dengan *plafond* antara Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai dengan *plafond* Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) setara dengan 2,5 %.
- d. Penetapan *margin/bagi hasil* pembiayaan dengan *plafond* antara Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) sampai dengan *plafond* Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) setara dengan 1,8 %.
- e. Penetapan *margin/bagi hasil* pembiayaan dengan *plafond* antara Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) sampai dengan *plafond* Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) setara dengan 1,6 %.
- f. Penetapan *margin/bagi hasil* pembiayaan dengan *plafond* Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) keatas setara dengan 1,3 %.

Penetapan margin/bagi hasil untuk anggota khusus akan ditetapkan pada peraturan tersendiri sesuai dengan keputusan pengurus.

4.3. Akuntansi Murabahah di KJKS BMT Ya Ummi Fatimah

Di bawah ini akan disajikan uraian yang berkaitan dengan akuntansi murabahah di KJKS BMT Ya Ummi Fatimah.

4.3.1 Gambaran Umum kebijakan Akuntansi

Untuk memudahkan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian yang terkait dengan transaksi keuangan, KJKS BMT Ya Ummi Fatimah menerapkan kebijakan akuntansi sebagai berikut :

1. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan KJKS BMT Ya Ummi Fatimah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), kecuali atas penilaian aset-aset tetap tertentu yang telah dinilai kembali sesuai dengan peraturan pemerintah. Laporan Arus Kas disajikan dengan pengklasifikasian arus kas bersih atas aktifitas operasi, aktifitas investasi dan aktifitas pendanaan dengan metode tidak langsung. Periode akuntansi KJKS BMT Ya Ummi Fatimah adalah dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

2. Piutang

Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Ya Ummi Fatimah mencatat piutang berdasarkan nilai bruto. Pihak BMT telah mengadakan cadangan kerugian piutang. Piutang dihapuskan setelah mendapat persetujuan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun sebelumnya.

3. Ekuitas

Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Ya Ummi Fatimah mempunyai ekuitas yang terdiri dari :

- Simpanan Pokok
- Simpanan Wajib
- Modal Penyertaan
- Cadangan
- SHU tahun berjalan

4. Sisa Hasil Usaha

Sisa Hasil Usaha merupakan keuntungan atau kerugian yang merupakan hasil kegiatan selama satu periode. Sisa Hasil Usaha akan dibagikan kepada anggota sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tetapi jika ada kebijakan lain akan diputuskan melalui rapat anggota tahunan. Sisa Hasil Usaha tertinggi dari usaha intern.

5. Pajak Penghasilan

Berdasarkan SAK ETAP Bab 24 tentang pajak penghasilan, beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode bersangkutan, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

6. Pendapatan dan Beban

Pendapatan dan beban diakui atas dasar prinsip *accrual basic* (dasar akrual), yaitu pendapatan dan beban dicatat pada saat terjadinya transaksi, dan bukan pada saat kas diterima atau diserahkan.

4.3.2. Perlakuan Akuntansi murabahah yang Diterapkan oleh KJKS BMT Ya Ummi Fatimah

Seperti yang diuraikan dalam sub bab 4.2.1 murabahah yang dipraktikkan di KJKS BMT Ya Ummi Fatimah merupakan pembiayaan berbasis jual beli. Hal ini disebabkan pihak BMT tidak memiliki risiko yang signifikan terhadap kepemilikan persediaan. Pada KJKS BMT Ya Ummi Fatimah, setelah membeli aset yang dimiliki oleh mitra pembiayaan, pihak BMT langsung menjual kembali aset tersebut kepada mitra pembiayaan, dan tidak menyimpan persediaan.

Untuk memudahkan dalam menjelaskan perlakuan akuntansi yang dilakukan KJKS BMT Ya Ummi Fatimah, penulis akan menjelaskan dengan studi kasus berikut ini.

Studi Kasus Akad *Murabahah*

Tanggal Pengajuan : 29/5/15

Nama : Imam Supeno

Alamat : Tlogowungu

Pengajuan : Rp. 50.000.000

Jangka Waktu : 36 bulan

Usaha	: Karyawan koperasi
Kegunaan	: Tambah Modal Usaha
Jaminan	: BPKB
<i>Plafond</i>	: Rp 50.000.000
Tanggal Realisasi	: 9/6/2015
Harga Beli	: Rp 65.000.000
Harga Jual	: Rp 93.800.000
Uang muka	: Rp 15.000.000
Sisa harus dibayar	: Rp 78.800.000
Pokok Pembiayaan	: Rp 50.000.000
Akumulasi <i>margin</i>	: Rp 28.800.000
Angsuran per bulan	: Rp 2.189.000
Pokok	: Rp 1.389.000
<i>Margin</i>	: Rp 800.000

Pada saat perolehan aset murabahah yaitu saat pihak BMT membeli aset milik Imam Supeno KJKS BMT Ya Ummi Fatimah mengakui persediaan aset murabahah bertambah sebesar harga beli, kas berkurang sebesar plafond pembiayaan, dan sisanya diakui sebagai penerimaan uang muka. Jurnalnya :

Persediaan aset murabahah 65.000.000

Kas / Rekening nasabah 50.000.000

Uang muka murabahah 15.000.000

Pada saat akad murabahah KJKS BMT Ya Ummi Fatimah mengakui piutang murabahah bertambah sebesar nilai aset murabahah ditambah margin murabahah yang ditanggihkan. Jurnalnya :

Piutang murabahah	78.800.000
Uang muka murabahah	15.000.000
Persediaan aset murabahah	65.000.000
Margin murabahah yang ditanggihkan	28.800.000

Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Ya Ummi Fatimah mengakui keuntungan dengan metode proporsional. Keuntungan diakui pada saat penerimaan angsuran. Berikut adalah tabel angsuran Imam Supeno.

Tabel 4.1
Tabel Angsuran

Tanggal Bayar	1 Angsuran Pokok (AP)	2 Total akumulasi AP	3 Mark Up (MU)	4 Total akumulasi MU	1+3 Jumlah Angsuran tiap bulan
06/2015	1.389.000	1.389.000	800.000	800.000	2.189.000
07/2015	1.389.000	2.778.000	800.000	1.600.000	2.189.000
08/2015	1.389.000	4.167.000	800.000	2.400.000	2.189.000
09/2015	1.389.000	5.556.000	800.000	3.200.000	2.189.000
10/2015	1.389.000	6.945.000	800.000	4.000.000	2.189.000
...
...
5/2018	1.389.000	50.000.000	800.000	28.800.000	2.189.000

(Sumber: KJKS BMT Ya Ummi Fatimah, 2016)

Pada saat mengakui penerimaan angsuran KJKS BMT Ya Umami Fatimah mengurangi piutang murabahah dengan jurnal :

Kas	2.189.000
Piutang murabahah	2.189.000

KJKS BMT Ya Umami Fatimah mengakui pendapatan murabahah dengan mengurangi margin murabahah yang ditangguhkan dengan jurnal :

Margin murabahah yang ditangguhkan	800.000
Pendapatan murabahah	800.000

Untuk penerimaan angsuran kedua dan seterusnya jurnal yang dibuat KJKS BMT Ya Umami Fatimah akan sama yaitu :

Kas	xxx
Piutang Murabahah	xxx
Margin murabahah yang ditangguhkan	xxx
Pendapatan murabahah	xxx

Apabila ada mitra pembiayaan yang tidak bisa melunasi sisa pinjaman dan oleh Rapat Anggota Tahunan piutang itu dihapuskan, maka jurnal yang dibuat oleh BMT adalah :

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	xxx
Piutang murabahah	xxx

Untuk menghapus margin murabahah yang ditangguhkan jurnalnya :

Margin murabahah yang ditangguhkan	xxx
Diskon Margin	xxx

Apabila ada mitra pembiayaan yang melunasi piutang lebih cepat dari waktu jatuh tempo, maka mitra pembiayaan tidak perlu membayar sisa margin yang belum dibayarkan. Sisa margin murabahah yang ditangguhkan akan dihapus sebagai diskon margin. Jurnal yang dibuat oleh BMT adalah :

Margin murabahah yang ditangguhkan	xxx
Diskon Margin	xxx

Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Ya Ummi Fatimah tidak memberikan denda pada mitra pembiayaan yang lalai dalam melakukan kewajibannya. Karena menurut pihak BMT tidak diperbolehkan menerima tambahan dari piutang yang diberikan melebihi dari harga jual yang telah disepakati. Apabila ada mitra pembiayaan yang lalai, maka pihak BMT akan memberikan teguran kepada mitra pembiayaan.

4.3.3. Penyajian piutang murabahah di neraca

KJKS BMT Ya Ummi Fatimah menyajikan piutang murabahah di neraca dalam pos pembiayaan dan piutang, yang merupakan jumlah seluruh pembiayaan dan piutang dikurangi dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Penyajian pembiayaan dan piutang dapat dilihat dalam Neraca per 31 Desember

2015. Jumlah piutang murabahah yang disajikan di neraca adalah jumlah bersih setelah dikurangi margin murabahah yang ditangguhkan. Neraca KJKS BMT Ya Ummi Fatimah lengkap bisa dilihat di lampiran 3.

Gambar 4.3
KJKS BMT Ya Ummi Fatimah Per 31 Desember 2015
Neraca (Parsial Penyajian Aset)
Per 31 Desember 2015

ASET	
Aset Lancar	
Kas dan Setara Kas	20.046.410.887
Pembiayaan dan Piutang	87.872.397.316
Persediaan	194.364.747
Beban Dibayar Dimuka	1.280.213.314
Jumlah Aset lancar	109.393.386.265
Aset Tidak Lancar	
Investasi Jangka panjang	565.741.064
Aset Tetap	
Tanah	1.231.650.000
Bangunan	3.621.964.568
Kendaraan	2.227.393.630
Inventaris	2.318.369.065
Harga Perolehan Aset Tetap	9.399.377.263
Akumulasi Penyusutan Aset tetap	(3.555.803.994)
Nilai Buku Aset Tetap	5.843.573.268
JUMLAH ASET	115.802.700.597

(Sumber: Lap.Keuangan th 2015)

Gambar 4.4**KJKS BMT Ya Ummi Fatimah****Catatan Atas Laporan Keuangan (Parsial penyajian Pembiayaan dan Piutang)****Periode Yang Berakhir 31 Desember 2015**

<u>Pembiayaan dan Piutang</u>	<u>87.872.397.316</u>
Jumlah tersebut merupakan saldo pembiayaan dan piutang	
Per 31 Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut :	
- Murabahah	68.601.057.027
- Bai' Bitsaman Ajil	19.314.119.922
- Musyarakah	70.000.000
- Mudharabah	8.000.000
- Qardhul Hasan Karyawan	762.000
- Piutang Lainnya	342.876.802
- Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	(464.418.435)
Jumlah Pembiayaan dan Piutang	<u>87.872.397.316</u>

(Sumber: Lap.Keuangan th 2015)

Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Ya Ummi Fatimah menyajikan pendapatan murabahah pada Laporan Perhitungan Hasil Usaha sebagai pos Pendapatan Marjin Piutang. Pendapatan Marjin Piutang dapat dilihat dalam Laporan Perhitungan Hasil Usaha periode yang berakhir 31 Desember 2015. Laporan

Perhitungan Hasil Usaha KJKS BMT Ya Umami Fatimah lengkap bisa dilihat di lampiran 4.

Gambar 4.5

KJKS BMT Ya Umami Fatimah

Laporan Perhitungan Hasil Usaha (Parsial Pendapatan Operasional)

Periode yang berakhir 31 Desember 2015

Pendapatan Operasional :	
- Pendapatan Marjin Piutang	14.029.446.289
- Pendapatan Basil Pembiayaan	4.032.000
Jumlah Pendapatan Operasional	14.033.478.289

(Sumber: Lap.Keuangan th 2015)

4.4. Pembahasan

Pada bab ini akan dibahas dua hal. Pertama, peneliti akan membahas tentang praktik dan kriteria murabahah di KJKS BMT Ya Umami Fatimah dibandingkan dengan PSAK 102 tahun 2013 dan teori. Kedua, peneliti akan membahas tentang perlakuan akuntansi di KJKS BMT Ya Umami Fatimah dibandingkan dengan PSAK 102 tahun 2013.

4.4.1. Praktik dan Kriteria Murabahah

Praktik murabahah di KJKS BMT Ya Umami Fatimah substansinya adalah utang piutang. Praktiknya pihak BMT membeli aset milik mitra pembiayaan untuk dijual kembali kepada mitra pembiayaan dengan harga yang lebih tinggi. Praktik

murabahah seperti yang dipraktikkan oleh KJKS BMT Ya Ummi Fatimah merupakan praktik bai' al-'inah. *Bai' al-'Inah* adalah sebuah akad dimana *deficit unit* memerlukan dana, lalu menjual aset yang dia miliki kepada *surplus unit* dengan cara tunai, lalu *surplus unit* akan menjual kembali aset tersebut kepada pihak *deficit unit* dengan cara tangguh atau cicilan. Bisa jadi aset yang dipakai adalah aset *deficit unit*, atau aset yang dimiliki oleh *surplus unit* dalam hal ini Bank Syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 94/DSN-MUI/IV/2014 menjelaskan Berdasarkan Prinsip Syariah bahwa *muwa'adah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk melakukan suatu akad sebagai hilah ribawi, antara lain transaksi jual-beli *'inah*, dan transaksi *bai' wa salaf*, adalah dilarang dalam syariat Islam. Jadi Praktik murabahah yang dilakukan oleh KJKS BMT Ya Ummi Fatimah termasuk jual beli yang dilarang. Murabahah yang dilakukan pihak BMT hanya sebuah cara untuk menghindari riba yang tidak sesuai dengan syariah, yang sebenarnya substansi dari praktik murabahah tersebut adalah sebagai pembiayaan utang piutang.

Dijelaskan dalam PSAK 102 tahun 2013 paragraf 41A, penjual yang tidak memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan untuk transaksi murabahah merupakan penjual yang melaksanakan transaksi pembiayaan murabahah. perlakuan atas transaksi tersebut mengacu pada PSAK 50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan pengukuran dan PSAK 60 tentang instrument keuangan: Pengungkapan, yang dalam penerapannya disesuaikan dengan prinsip, karakteristik, dan istilah transaksi

syariah. Risiko yang terkait dengan kepemilikan persediaan dijelaskan dalam PSAK 102 tahun 2013 paragraf 41B antara lain adalah risiko perubahan harga persediaan, keusangan dan kerusakan persediaan, biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan, risiko pembatalan pesanan pembelian secara sepihak. Dijelaskan lebih lanjut dalam dasar kesimpulan PSAK 102 tahun 2013 paragraf 19 bahwa entitas yang menggunakan SAK ETAP sebagai dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangannya tidak mengacu pada PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60 untuk transaksi murabahah yang merupakan pembiayaan berbasis jual beli. Entitas tersebut mengacu pada SAK ETAP dimana acuan yang digunakan antara lain adalah SAK ETAP Bab 20 tentang pendapatan, dan Bab 22 tentang penurunan nilai. Praktik murabahah di KJKS BMT Ya Ummi Fatimah tidak memiliki risiko yang signifikan atas kepemilikan persediaan, karena setelah membeli aset dari mitra pembiayaan, yang sebenarnya itu merupakan aset yang digunakan sebagai jaminan, pihak BMT langsung menjual kembali aset tersebut kepada mitra pembiayaan secara tangguh. Sehingga pihak BMT secara substansi tidak pernah memiliki persediaan. Sesuai dengan PSAK 102 tahun 2013 perlakuan akuntansi murabahah pada KJKS BMT Ya Ummi Fatimah wajib mengacu pada SAK ETAP dimana acuan yang digunakan antara lain adalah SAK ETAP Bab 20 tentang pendapatan dan Bab 22 tentang penurunan nilai aset.

4.4.2. Akuntansi Murabahah

Praktik akuntansi murabahah pada BMT Ya Ummi Fatimah mengakui persediaan aset murabahah saat membeli barang dari mitra pembiayaan yang kemudian dijual kembali pada saat yang sama kepada mitra pembiayaan secara tangguh. Secara substansi pihak BMT tidak pernah memiliki persediaan, karena proses jual beli persediaan hanya untuk menghindari riba atau bunga. Pihak BMT juga tidak memiliki risiko terhadap kepemilikan persediaan. Dalam SAK ETAP Bab 2.6 dijelaskan bahwa transaksi, peristiwa, dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realita ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan. Secara substansi pihak BMT memberikan piutang kepada mitra pembiayaan meskipun dalam bentuk jual-beli. Dari substansi tersebut maka pihak BMT tidak perlu mengakui persediaan.

Pada saat pengakuan piutang murabahah pihak BMT mengakui piutang murabahah dengan menghapus persediaan aset murabahah, kemudian sisanya diakui sebagai margin murabahah yang ditangguhkan. Karena seharusnya BMT tidak mengakui persediaan maka tidak perlu menghapus persediaan. pihak BMT seharusnya hanya mengakui piutang murabahah dengan mengurangi kas dan menambah margin murabahah yang ditangguhkan. Jurnal yang seharusnya dibuat oleh KJKS BMT Ya Ummi Fatimah yaitu :

Piutang murabahah	78.000.000
Kas	50.000.000
Margin murabahah yang ditangguhkan	28.800.000

Atau transaksi ini tidak masuk transaksi murabahah, tapi termasuk pembiayaan biasa dengan jurnal :

Pada saat memberikan pinjaman :

Pinjaman yang diberikan	50.000.000
Kas	50.000.000

Pada saat menerima angsuran :

Kas	2.189.000
Pinjaman yang diberikan	1.389.000
Pendapatan Bunga	800.000

Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Ya Ummi Fatimah mengakui penerimaan pokok angsuran, dan pendapatan pada saat menerima pembayaran angsuran sebesar presentase pokok, dan margin yang diakui. Pihak BMT mengakui pendapatan dengan metode proporsional. Pengakuan pendapatan sudah sesuai dengan SAK ETAP Bab 20 Paragraf 27 yang menjelaskan bahwa pendapatan bunga atau margin diakui secara akrual.

4.4.3. Penyajian dan pengungkapan

Koperasi Jasa keuangan Syariah BMT Ya Ummi Fatimah sudah menyajikan piutang murabahah sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi Penyisihan Penghapusan aktiva Produktif. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Ya Ummi Fatimah sudah mematuhi PSAK 102 tahun 2013 paragraf 37 dalam menyajikan piutang murabahah.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Ya Ummi Fatimah tidak menyajikan margin murabahah yang ditangguhkan di neraca. Jumlah piutang murabahah yang disajikan dalam neraca BMT sudah merupakan jumlah setelah dikurangi margin murabahah yang ditangguhkan. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Ya Ummi Fatimah belum melaksanakan PSAK 102 tahun 2013 paragraf 38 dalam menyajikan margin murabahah yang ditangguhkan.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Ya Ummi Fatimah mengungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan tentang kebijakan akuntansi yang diterapkan sebagai dasar pengakuan pendapatan, yaitu diakui atas dasar prinsip accrual basic (dasar akrual). Pihak BMT telah menyajikan jumlah pendapatan margin piutang dalam Laporan Perhitungan Hasil Usaha. Pengakuan pendapatan margin murabahah pada KJKS BMT Ya Ummi Fatimah telah sesuai dengan SAK ETAP Bab 20 Paragraf 28 yang menjelaskan bahwa entitas harus mengungkapkan kebijakan akuntansi yang diterapkan sebagai dasar pengakuan pendapatan. Entitas juga harus mengungkapkan jumlah setiap kategori pendapatan yang diakui selama periode.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Ya Ummi Fatimah telah mengadakan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) sebesar 1,5% dari sisa piutang. Pihak BMT menyajikan PPAP dalam Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai pengurang piutang dan pembiayaan. Pihak BMT tidak mengungkapkan jumlah kerugian penurunan nilai dan pemulihan kerugian penurunan nilai dalam Laporan Laba Rugi. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Ya Ummi Fatimah belum menerapkan sepenuhnya SAK ETAP Bab 22 tentang penurunan nilai.

4.4.4. Ringkasan hasil penelitian

Penelitian telah dilakukan terhadap praktik murabahah, dan perlakuan akuntansi murabahah di KJKS BMT Ya Ummi Fatimah. Berikut ini adalah tabel ringkas yang menunjukkan tentang perbedaan antara teori dengan praktik di BMT, dan rekomendasi yang diberikan oleh peneliti.

Tabel 4.2
Ringkasan Hasil Penelitian

Teori	Praktik di BMT	Rekomendasi
Praktik murabahah		
Jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Mitra	Jual beli barang yang menjadi jaminan dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang	Murabahah yang dipraktikkan BMT merupakan jual beli I'nah yang diharamkan. Pihak BMT harus mengganti

pembiayaan mendapatkan barang.	disepakati. Mitra pembiayaan mendapatkan pinjaman uang	praktik jual beli murni, atau pembiayaan jual beli seperti diatur dalam PSAK 102 tahun 2013 paragraf 41 A.
Pengukuran dan pengakuan Tidak ada pengakuan persediaan	Pada saat perolehan, Aset murabahah diakui sebagai persediaan aset murabahah sebesar harga perolehan	Pihak BMT seharusnya tidak mengakui persediaan, karena secara substansi tidak pernah menyimpan persediaan.
Piutang murabahah diakui sebesar pokok piutang ditambah margin keuntungan yang disepakati	Piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset ditambah margin keuntungan yang disepakati	Karena memberikan pinjaman uang maka pihak BMT mengakui piutang sebesar pokok ditambah margin yang disepakati

Pendapatan margin dapat dihitung secara proporsional atau anuitas, diakui sebesar kas yang berhasil ditagih	Pendapatan margin dihitung secara proporsional, diakui sebesar kas yang berhasil ditagih	Tetap dipertahankan
Potongan pelunasan piutang murabahah diberikan apabila mitra pembiayaan melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu jatuh tempo sebagai pengurang keuntungan murabahah	Apabila mitra pembiayaan melunasi lebih cepat dari waktu jatuh tempo, maka mitra pembiayaan tidak perlu membayar sisa margin yang belum dibayar. Sisa margin diakui sebagai diskon margin	Tetap dipertahankan
Denda yang diterima karena kelalaian mitra pembiayaan diakui sebagai dana kebajikan	Tidak menerapkan denda	Tetap dipertahankan

<p>Penyajian dan pengungkapan</p> <p>Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang</p>	<p>Pihak BMT menyajikan piutang murabahah sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif</p>	<p>Tetap dipertahankan</p>
<p>Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah</p>	<p>Pihak BMT tidak menyajikan margin murabahah yang ditangguhkan. Jumlah piutang murabahah yang disajikan merupakan nilai setelah dikurangi margin murabahah yang ditangguhkan</p>	<p>Seharusnya pihak BMT menyajikan margin murabahah yang ditangguhkan sebagai pengurang piutang murabahah</p>

<p>Entitas harus mengungkapkan :</p> <p>a. kebijakan akuntansi yang diterapkan sebagai dasar pengakuan pendapatan.</p> <p>b. jumlah setiap kategori pendapatan, termasuk pendapatan bunga/margin</p>	<p>Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan diungkapkan tentang pengakuan pendapatan, yaitu diakui atas dasar akrual. Pihak BMT sudah mengungkapkan jumlah pendapatan margin piutang</p>	<p>Tetap dipertahankan</p>
<p>Penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dibentuk sebesar estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih.</p>	<p>Pihak BMT telah mengadakan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif sebesar 1,5% dari realisasi piutang</p>	<p>Tetap dipertahankan</p>
<p>Entitas mengungkapkan jumlah kerugian penurunan nilai dan pemulihan kerugian penurunan nilai dalam Laporan Laba Rugi.</p>	<p>Pihak BMT tidak mengungkapkan jumlah kerugian penurunan nilai dan pemulihan kerugian penurunan nilai dalam Laporan Laba Rugi.</p>	<p>Harus diungkapkan jumlah kerugian penurunan nilai dan pemulihan kerugian penurunan nilai dalam Laporan Laba Rugi.</p>



BAB V

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai perlakuan akuntansi murabahah pada KJKS BMT Ya Ummi Fatimah maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik pembiayaan akad murabahah pada KJKS BMT Ya Ummi Fatimah belum sesuai dengan PSAK 102 tahun 2013 tentang Akuntansi Murabahah, dan hukum Islam. Praktik yang dilakukan pihak BMT merupakan jual beli *'inah* yang tidak diperbolehkan. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 94/DSN-MUI/IV/2014 menjelaskan berdasarkan Prinsip Syariah bahwa *muwa'adah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk melakukan suatu akad sebagai hilah ribawi, antara lain transaksi jual-beli *'inah*, dan transaksi *'bai' wa salaf*, adalah dilarang dalam syariat Islam.
2. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Ya Ummi Fatimah salah dalam menentukan kriteria murabahah yang dipraktikkan. Pihak KJKS BMT Ya Ummi Fatimah mengklasifikasikan murabahah yang dipraktikkan sebagai jual beli murni. Praktik di KJKS BMT Ya Ummi Fatimah barang yang dijadikan agunan seolah-olah dibeli oleh BMT, kemudian dijual kembali kepada mitra pembiayaan secara mengangsur. Menurut peneliti yang dipraktikkan pihak KJKS BMT Ya Ummi Fatimah adalah praktik **pembiayaan murabahah**, karena pihak BMT secara substansi tidak memiliki

persediaan. seperti dijelaskan dalam PSAK 102 tahun 2013 paragraf 41A, penjual yang tidak memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan untuk transaksi murabahah merupakan penjual yang melaksanakan transaksi **pembiayaan murabahah**. Koperasi yang melakukan **pembiayaan murabahah** menggunakan SAK ETAP sebagai dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangannya, antara lain adalah SAK ETAP Bab 20 tentang pendapatan, dan Bab 22 tentang penurunan nilai.

3. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Ya Ummi Fatimah salah dalam mengakui persediaan. seharusnya pihak BMT tidak perlu mengakui adanya persediaan, karena substansinya tidak pernah menyimpan persediaan.

4. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Ya Ummi Fatimah belum menerapkan sepenuhnya SAK ETAP Bab 22 tentang penurunan nilai. Pihak BMT tidak mengungkapkan jumlah kerugian penurunan nilai dan pemulihan kerugian penurunan nilai dalam Laporan Laba Rugi.

5. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Ya Ummi Fatimah belum melaksanakan PSAK 102 tahun 2013 paragraf 38 dalam menyajikan margin murabahah yang ditangguhkan. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Ya Ummi Fatimah tidak menyajikan margin murabahah yang ditangguhkan di neraca. Jumlah piutang murabahah yang disajikan dalam neraca BMT sudah merupakan jumlah setelah dikurangi margin murabahah yang ditangguhkan.

